

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pendirian negara menurut konstitusi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kesejahteraan hanya bisa tercapai melalui pelaksanaan program pembangunan ekonomi nasional (Harjanto, 2024). Indonesia merupakan negara berkembang yang menitik beratkan pada kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci atau indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara (Asrinda & Setiawati, 2022). Pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan sejak tahun 2010 hingga 2024. Secara umum, Indonesia telah menghadapi beberapa tantangan utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, seperti ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, ketergantungan pada ekspor komoditas, serta perubahan ekonomi global yang memengaruhi stabilitas makroekonomi (R. Ningsih & Sandriani, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah mencari instrumen kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal asing (Rauf, 2024). Ameliana & Soebagyo (2023) menyebutkan bahwa perekonomian suatu negara sangat ditentukan aliran modal atau investasi yang masuk ke dalam rantai perekonomian. Investasi, terutama *Foreign Direct*

Investment (FDI) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi mesin pertumbuhan bagi perekonomian (Cahyaningsih, 2015). Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menarik investasi asing sebagai salah satu strategi utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Investasi asing diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Lestari & Murialti, 2025).

Dalam hal ini, pemerintah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai strategi untuk menarik investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional (Hudani et al., 2025a). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia bertujuan untuk menciptakan peluang peningkatan investasi dengan menyiapkan area yang memiliki keunggulan untuk mendukung kegiatan industri, ekspor-impor, serta aktivitas ekonomi bernilai tinggi (Gustiani & Agustino, 2025). Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus dirancang sebagai strategi untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan devisa, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan regional (Anwar et

al., 2023). Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan laju investasi di Kepulauan Riau, Kawasan Ekonomi Khusus berperan penting dalam pengembangan kawasan sektoral industri (Irawan et al., 2024).

Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai salah satu wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus karena letak geografisnya yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan dunia, pariwisata nasional, pusat industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing internasional (Riawan & Akbar, 2024). Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah Kawasan Ekonomi Khusus terbanyak di Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan strategis, karena memiliki potensi besar untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat lima Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic (BAT), Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park (NDP), Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh, dan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan dan Pariwisata Internasional Batam (Hudani et al., 2025).

Seiring dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, program transmigrasi modern juga diterapkan sebagai strategi pembangunan kawasan yang saling melengkapi. Pada awalnya, transmigrasi dirancang untuk memindahkan penduduk dari daerah padat menuju wilayah yang jarang penduduk. Namun, dalam konteks pembangunan modern, program ini telah berevolusi menjadi strategi pembangunan kawasan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan (KPU, 2025). Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsep transmigrasi kini difokuskan pada pembangunan kawasan berbasis

potensi lokal dan komoditas unggulan, yang berperan dalam membuka sentra produksi baru dan memperkuat basis ekonomi lokal di luar pusat pertumbuhan tradisional (Buchari et al., 2025).

Keterkaitan antara investasi asing, Kawasan Ekonomi Khusus, dan transmigrasi menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan wilayah secara terpadu. Penelitian oleh Hasanah (2025) menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap investasi asing dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang mencerminkan peran investasi asing sebagai pendorong utama dinamika ekonomi di kawasan strategis tersebut. Dalam kerangka ini, investasi asing tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kegiatan ekonomi baru yang membutuhkan sumber daya manusia yang memadai serta keterlibatan masyarakat lokal, yang salah satunya dapat diperkuat melalui program transmigrasi modern yang memfokuskan pada pemberdayaan kawasan (Transmigrasi, 2025). Oleh karena itu, memahami dinamika antara investasi asing, Kawasan Ekonomi Khusus, dan transmigrasi menjadi penting dalam upaya merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, terutama di daerah strategis seperti Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Berdasarkan penelitian Hudani et al. (2025) yang mengevaluasi dampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan

Ekonomi Khusus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan antar wilayah sehingga manfaat pembangunan masih bersifat parsial dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Selanjutnya, penelitian Ningsih & Najamuddin (2021) mengkaji pengembangan kawasan transmigrasi dalam kerangka peningkatan pembangunan daerah dengan menekankan aspek tata kelola, perencanaan, dan peran pemerintah daerah, yang menemukan bahwa transmigrasi memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemerataan pembangunan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi transmigrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu, Daim (2020) dalam penelitiannya mengenai strategi pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna menegaskan bahwa keberhasilan transmigrasi sangat ditentukan oleh pendekatan pembangunan berbasis kawasan ekonomi, kemitraan multipihak, dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif agar transmigrasi tidak hanya berfungsi sebagai program kependudukan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan wilayah dan penguatan ketahanan nasional.

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak Kawasan Ekonomi Khusus, peran transmigrasi, dan strategi pengembangan wilayah, belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dinamika investasi asing di Kawasan Ekonomi Khusus dengan pengembangan konsep transmigrasi sebagai satu kesatuan strategi pembangunan wilayah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji dinamika

antara investasi asing di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau dan pengembangan konsep transmigrasi sebagai instrumen pemerataan pembangunan, penyediaan tenaga kerja, serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan. Dengan mengambil studi kasus investasi Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau, penelitian ini tidak hanya menganalisis dampak ekonomi investasi asing, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap kebijakan kependudukan dan pembangunan wilayah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan transmigrasi yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami dinamika investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi di Indonesia, khususnya melalui studi kasus investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dinamika investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi di Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitan antara Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau terhadap investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan dinamika investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi di Indonesia.
2. Mendeskripsikan keterkaitan antara Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau terhadap investasi asing dan pengembangan konsep transmigrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam perspektif ekonomi politik internasional terkait dinamika investasi asing dan pembangunan wilayah.
- b. Memperkaya pemahaman konseptual mengenai transmigrasi sebagai instrumen pembangunan nasional dalam konteks masuknya investasi asing dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
- c. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara investasi asing, Kawasan Ekonomi Khusus, dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan investasi asing yang terintegrasi dengan kebijakan

transmigrasi, khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengelolaan mobilitas penduduk.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah dalam mengoptimalkan manfaat investasi asing di Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ketimpangan pembangunan.
- c. Bagi Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis dalam perencanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang lebih inklusif, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigran.
- d. Bagi Masyarakat Lokal dan Transmigran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang ekonomi, dan perubahan sosial, serta tantangan yang muncul akibat dinamika investasi asing di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus .
- e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi empiris dan konseptual dalam pengembangan kajian terkait investasi asing, transmigrasi, dan pembangunan wilayah.